

Menata Agroindustri

sebagai sumber pembayaran Utang



Oleh : Dr. Ir. Muhammad Said Didu^{*)}



TERDAPAT LIMA PERTIMBANGAN
UNTUK MENJADIKAN AGROINDUSTRI MENJADI
SUMBER UTAMA UNTUK MEMBAYAR UTANG, YAITU :

- (1) BAHWA INDONESIA PADA DASARNYA
ADALAH NEGARA PERTANIAN,
- (2) SEBAGIAN BESAR RAKYAT KITA HIDUP
DARI SEKTOR PERTANIAN,
- (3) SDM PERTANIAN TELAH MAMPU
MELAKSANAKAN TRANSFORMASI TEKNOLOGI
PERTANIAN SECARA BAIK,
- (4) DAYA SAING PRODUK PERTANIAN DAPAT
DITINGKATKAN SECARA BAIK DENGAN
MEMANFAATKAN KEMAJUAN TEKNOLOGI, DAN
- (5) BAHWA KEUNGGULAN KOMPARATIF YANG
DIMILIKI DAPAT DIKEMBANGKAN MENJADI
KEUNGGULAN KOMPETITIF DALAM
ERA GLOBALISASI.

UNTUK MENEMBUS PASAR GLOBAL, DIPERLUKAN
LANGKAH-LANGKAH SEBAGAI BERIKUT :

- (1) MENGHASILKAN PRODUK BERKUALITAS,
- (2) KONSISTEN, MELALUI KONTROL PROSES YANG
KETAT (TERUTAMA PENGENDALIAN MUTU),
- (3) PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA,
TEPAT SASARAN DAN RELEVAN, SERTA
- (4) MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN JARINGAN
PEMASARAN YANG HANDAL.

UNTUK MEMPERLUAS PASAR DAN MENINGKATKAN
DAYA SAING DI PASAR GLOBAL, STRATEGI YANG
DILAKUKAN ADALAH MEMBANGUN JOINT VENTURE
DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI TERBAIK,
MENDEKATI PASAR, MEMPRODUKSI PRODUK UNTUK
PASAR LOKAL DAN EKSPOR.

SELAIN ITU, JUGA DIPERLUKAN ADANYA ALIANSI
DENGAN PERUSAHAAN LAIN UNTUK MENGIMPOR
PRODUK YANG Mendukung PEMASARAN PRODUK
YANG DIHASILKAN DI PASAR LOKAL.

^{*)} Pakar Agroindustri BPPT

PENDAHULUAN

Kondisi masyarakat yang terhimpit berbagai permasalahan telah merongrong berbagai sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagian besar masyarakat seakan sudah dihadapkan pada jalan buntu untuk keluar dari permasalahan. Bahkan sebagian telah mulai dihindari rasa frustrasi. Terdapat 7 (tujuh) permasalahan berat yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu : (1) kondisi perekonomian yang tak kunjung pulih, (2) ketegangan dan kerusuhan sosial yang terus meningkat, (3) kepastian dan penegakan hukum yang semakin terpuruk, (4) jaminan keamanan semakin sulit didapatkan, (5) kebijakan pemerintah yang belum jelas arah dan tidak konsistens, (6) utang luar negeri yang semakin membesar, serta (7) tekanan internasional yang semakin meningkat. Kesemuanya permasalahan tersebut secara bersama-sama membawa masyarakat Indonesia kearah penciptaan kondisi yang menurunkan semangat untuk mencari jalan keluar dan bangkit kembali dalam menata kehidupannya. Permasalahan sudah merasuk pada permasalahan mental masyarakat yang seakan sudah menjadi bangsa kelas dua dalam pergaulan internasional.

Kondisi demikian semakin memperberat bangsa Indonesia dalam menyongsong globalisasi. Agar Indonesia dapat bangkit, dibutuhkan semangat “superior” dan keyakinan “lebih” untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang cukup rumit dan kompleks tersebut. Dibutuhkan pemikiran baru yang dapat dijadikan arahan komponen bangsa untuk meningkatkan pengabdian dalam menghantarkan bangsa keluar dari krisis multidimensi yang masih terus berlangsung. Selanjutnya, secara bertahap bangkit dengan keyakinan, sikap, dan tindakan untuk mengangkat masyarakat dari keterpurukan ekonomi dan kemerosotan kepercayaan dari dunia internasional.

Salah satu permasalahan yang cukup rumit untuk diselesaikan adalah melepaskan diri dari lilitan utang luar negeri. Dibutuhkan adanya terobosan baru untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika penyelesaian permasalahan tersebut tidak menunjukkan titik terang, dikhawatirkan semakin menyebarnya paradigma yang menganggap bahwa dalam jangka panjang Indonesia sudah sangat sulit untuk meningkatkan kemampuan

ekonominya. Hal tersebut dapat menjadi faktor pemicu munculnya pemikiran bagi daerah yang kaya akan sumberdaya alam semakin ingin mandiri atau bahkan memisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Sangat disayangkan bahwa sampai saat ini belum ada strategi untuk menyelesaikan masalah utang tersebut pada masa akan datang. Tiap penyusunan anggaran, yang ada adalah program dan rencana untuk menambah utang baru. Keberhasilan menambah utang seakan-akan menjadi kebanggaan lembaga yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan nasional. Akumulasi utang yang demikian besar dan akan terus bertambah akan semakin membebani seluruh rakyat. Penambahan utang pada tahun-tahun terakhir tidak lagi diutamakan untuk pembangunan sektor produktif melainkan untuk menutupi kekurangan anggaran, seperti untuk menutupi defisit anggaran untuk membayar bunga obligasi dalam rangka rekapitalisasi perbankan yang mencapai Rp. 50 trilyun per tahun. Untuk mengurangi beban rakyat sebagai dampak dari semakin membengkaknya utang luar negeri, sudah selayaknya disusun strategi nasional untuk menyelesaikan utang tersebut.

LANDASAN KEBIJAKAN

Secara ekonomi, bangsa Indonesia sudah termasuk bangsa miskin dengan pendapatan perkapita hanya \$ 550 (tahun 1996 pendapatan perkapita sudah mencapai \$ 1.200). Tahun 1966, awal lahirnya orde baru kondisi perekonomian kita sangat parah. Ditandai dengan tingkat inflasi yang mencapai 600 persen dan kelangkaan berbagai kebutuhan masyarakat. Namun saat itu, kita masih memiliki sumberdaya alam, terutama tambang dan hutan yang cukup besar serta belum dihadapkan pada persaingan ekonomi global yang semakin ketat.

Sehingga dengan strategi yang matang, secara bertahap pemerintahan orde baru dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui eksploitasi sumberdaya alam yang ada. Dengan semangat untuk memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintahan orde baru selain melakukan eksploitasi sumberdaya alam juga berupaya mendapatkan utang luar negeri untuk investasi sarana dan prasarana. Tidak sedikit korban dalam masyarakat sebagai dampak dari semangat berlebih untuk memacu pertumbuhan tersebut. Saat ini

kondisi tersebut sudah berubah.

Dalam satu dasawarsa ke depan, diperkirakan minyak yang kita miliki hanya cukup untuk konsumsi sendiri (net importir). Hutan sebagai salah satu sumber devisa sebagian besar sudah rusak, bahkan membutuhkan dana yang sangat besar untuk merehabilitasi kerusakan yang telah terjadi. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa Indonesia seakan sudah tidak memiliki peluang untuk bangkit kembali menjadi bangsa yang “merdeka” dari utang, kecuali atas belas kasihan negara atau lembaga kreditor. Tingginya beban utang merupakan salah satu faktor penyebab semakin turunnya kredibilitas bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional. Gambaran tersebut mengharuskan kita untuk mencari potensi bangsa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Menempatkan pertanian dan agroindustri sebagai prioritas pembangunan ekonomi dan pilar perekonomian rakyat merupakan amanat yang tertung dalam GBHN 1999 - 2004. Terdapat tujuh amanat GBHN yang menjadi landasan pengembangan agroindustri dalam kurun waktu lima tahun ke depan. **Pertama**, bahwa pembangunan ekonomi harus dikembangkan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Artinya, kedaulatan ekonomi ada di tangan rakyat yang meliputi 80 persen bergerak di sektor pertanian yang merupakan basis untuk mengembangkan agroindustri kerakyatan. **Kedua**, pengembangan ekonomi hendaknya dilaksanakan berdasarkan orientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris. **Ketiga**, bahwa pengembangan ekonomi harus dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas. Pengembangan produk unggulan daerah yang memanfaatkan produk pertanian dalam arti luas yang disesuaikan dengan kompetensi daerah akan mendorong berkembangnya agroindustri. **Keempat**, pengembangan industri, perdagangan dan investasi terutama yang berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia. **Kelima**, pemerintah harus memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing. Pemerintah diperkenankan memberikan fasilitas dari negara secara selektif dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, informasi

bisnis dan teknologi, permodalan, dan perlindungan dari persaingan yang tidak sehat.

Keenam, bahwa penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal. Sebagai negara agraris, maka pengembangan teknologi hendaknya dititikberatkan pada teknologi pertanian untuk mendorong berkembangnya agribisnis dan agroindustri dalam masyarakat. Dan ketujuh, bahwa dalam lima tahun ke depan pembangunan pedesaan ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat, terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana pembangunan, sistem agribisnis, pengembangan kelembagaan, dan penguasaan teknologi.

Dengan amanat demikian, maka seluruh komponen bangsa selayaknya melaksanakan amanat tersebut secara konsisten. Jika ketujuh amanat tersebut dilaksanakan secara baik, maka upaya untuk mewujudkan pertanian yang terkelola berdasarkan pendekatan agribisnis dengan agroindustri sebagai motor penggerak utamanya dapat diwujudkan. Kondisi demikian akan menjadi landasan dalam mewujudkan agribisnis dan agroindustri sebagai pilar perkenomian rakyat dan basis ekonomi bangsa. Disinilah pentingnya menjadikan pertanian sebagai *common platform* pembangunan nasional. Artinya bahwa seluruh potensi ekonomi ditujukan untuk mendukung pertumbuhan pertanian untuk melahirkan ekonomi yang berbasis kuat dalam masyarakat.

Sebagai *common platform* pembangunan nasional diperlukan kelembagaan yang mampu mengakomodir dan mengelola dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi pembangunan pertanian dan pengembangan agribisnis dan agroindustri. Ditengarai bahwa salah satu kelemahan yang menghambat pengembangan agribisnis dan agroindustri adalah belum terpadunya lembaga pemerintah yang mengelola kebijakan pertanian. Di masa depan, peran kelembagaan pertanian hendaknya semakin ditingkatkan ke arah yang lebih mampu untuk mengembangkan pertanian sebagai bahan baku industri, mampu mengendalikan kebijakan input, proses, dan output pertanian termasuk produk agroindustri. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah yang menyangkut

kebijakan perdagangan. Lembaga agroindustri diharapkan mampu mengefektifkan pengelolaan input agroindustri berupa bahan baku, teknologi, SDM, pendanaan, dan informasi. Untuk mewujudkan pertanian menjadi basis ekonomi bangsa dukungan kebijakan politik dan ekonomi merupakan prasyarat mutlak bagi pembangunan pertanian yang berwawasan masa depan.

Perubahan kegiatan pertanian menjadi usaha agribisnis dan agroindustri akan merubah posisi komoditas pertanian yang selama ini lebih banyak dipandang sebagai komoditas perdagangan menjadi komoditas yang siap diolah. Berarti produk pertanian dipandang sebagai bahan baku industri yang mengandung berbagai unsur atau komponen yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya.

Pandangan demikian akan merubah strategi pembangunan pertanian yang selama ini masih banyak dikelola secara konvensional, menjadi bagian dari aktivitas sistem agribisnis dan agroindustri. Pengembangan pertanian yang demikian akan bertumpu pada pemanfaatan teknologi. Berarti seluruh aktivitas dalam sistem agribisnis dan agroindustri harus tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

AGROINDUSTRI SEBAGAI JALAN KELUAR

Pada masa mendatang, peran pertanian dalam pembangunan nasional akan semakin diandalkan sebagai: (1) pemacu pertumbuhan ekonomi nasional (termasuk sebagai sumber perolehan devisa), (2) penyedia pangan dan papan, (3) penyedia bahan baku industri, (4) pencipta kesempatan dan perluasan lapangan kerja, (5) pemacu pemerataan pembangunan nasional, serta (6) sebagai faktor penentu stabilitas nasional. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui proses transformasi kegiatan pertanian menjadi kegiatan usaha agribisnis dan agroindustri. Proses transformasi demikian dapat berlangsung dengan baik jika posisi sektor pertanian dijadikan menjadi sektor unggulan dalam pembangunan perekonomian nasional.

Memasuki era globalisasi, dibutuhkan produk unggulan dan produk andalan agroindustri yang memiliki daya saing dan bernilai tambah tinggi. Produk demikian memerlukan penerapan teknologi tepat guna dan tepat sasaran serta

dikelola dalam usaha dengan manajemen modern melalui pendekatan *quality, cost dan delivery* (QCD). Artinya, seluruh mata rantai sistem mulai dari aspek produksi, pasca panen, transportasi dan distribusi sampai ke pemasaran mengutamakan aspek kualitas, biaya produksi yang efisien, dan waktu penyerahan yang tepat.

Keberhasilan pembangunan pertanian dan agroindustri baik di tingkat nasional maupun daerah dapat diukur dari : (1) besarnya sumbangan dalam memacu pertumbuhan ekonomi, (2) besarnya penyerapan tenaga kerja, (3) kemampuan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat, (4) besarnya peran peningkatan nilai tambah produk pertanian, (5) besarnya perolehan devisa, (5) perkembangan investasi, dan (6) peningkatan pangsa pasar agroindustri di pasar global.

Di tengah-tengah kekhawatiran, bahkan keyakinan bahwa perekonomian Indonesia akan semakin terpuruk, pada akhir tahun 1999 sampai tahun 2000 dapat dikatakan bahwa pemerintahan tidak bekerja secara efektif, lembaga ekonomi moderen seperti bank dan perusahaan formal tidak berjalan (sedang dipenjara oleh BPPN). Demikian juga halnya dengan instrumen perdagangan seperti L/C belum mendapatkan kepercayaan yang memadai. Penegakan hukum belum berjalan dengan baik, bahkan keamanan berusaha masih menjadi permasalahan. Dalam kondisi demikian, perekonomian tumbuh sekitar 3 - 4 persen dan pertumbuhan ekspor menunjukkan angka yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlalu rendah jika dibandingkan pada saat kondisi normal, yaitu sekitar 7 - 8 persen. Kondisi demikian menunjukkan bahwa terdapat potensi ekonomi yang kemampuannya kurang diperhitungkan oleh para pakar selama ini, yaitu perekonomian rakyat.

Perekonomian rakyat Indonesia didominasi oleh kegiatan yang berbasis pada pertanian yang diwujudkan dalam bentuk usaha agribisnis dan agroindustri. Potensi ekonomi tersebut merupakan rahmat Tuhan atau Sunnatullah. Perekonomian rakyat yang berbasis pada agroindustri (dalam tulisan ini diistilahkan dengan agro-ekonomi) telah menjadi juru selamat dari keterpurukan ekonomi. Agro-ekonomi telah menjadi udara penyelamat dari gejala terjun bebasnya perekonomian nasional. Pertanyaannya adalah

apakah potensi ekonomi pertanian dapat dijadikan andalan bangsa Indonesia sebagai motor penggerak perekonomian nasional? Selanjutnya, apakah dapat diandalkan sebagai sumber devisa untuk membayar utang yang terus meningkat?

Bangkitnya perekonomian rakyat yang berbasis pertanian (agribisnis dan agro-industri), yang dalam tulisan ini diistilahkan sebagai sektor agro-ekonomi telah merubah basis perekonomian Indonesia selama masa krisis. Mengalirnya utang luar negeri dalam pengembangan industri untuk memanfaatkan potensi pasar domestik ternyata telah melahirkan pertumbuhan perekonomian semu. Sektor agro-ekonomi yang memanfaatkan potensi domestik untuk memasuki pasar global merupakan basis baru perekonomian Indonesia yang secara riil tumbuh. Hal demikian mendorong terwujudnya perekonomian yang sesuai dengan fitrah Indonesia sebagai negara agraris. Adalah tidak salah, pendapat yang menyatakan bahwa kita masih memiliki potensi untuk bangkit kembali. Sumberdaya alam terbarukan yang dimiliki masih cukup potensial. Kita masih memiliki produk pertanian unggulan yang dapat dikembangkan menjadi lokomotif perekonomian nasional. Sebagai lokomotif kebangkitan ekonomi, di era perdagangan bebas maka pengembangan agroindustri hendaknya memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam era globalisasi. Potensi Agroindustri Selama ini, tidak sedikit ahli yang meragukan kemampuan agroekonomi untuk menyelamatkan bangsa.

Bahkan banyak yang berpendapat bahwa pertanian hanyalah menjadi beban pembangunan. Namun, tidak ada yang dapat membantah bahwa bangsa Indonesia dapat selamat dari kebangkrutan ekonomi karena adanya produk pertanian yang memiliki daya saing dalam masa krisis. Daya tangkal produk pertanian terhadap penyelesaian krisis telah dibuktikan oleh berbagai negara, termasuk Amerika Serikat saat terjadi krisis ekonomi tahun 1926.

BERBAGAI DATA MENUNJUKKAN BAHWA APABILA AGROEKONOMI DIKELOLA DENGAN BAIK, MAKA AKAN TERJADI PENINGKATAN EKSPOR PRODUK PERTANIAN. DALAM PENGEMBANGANNYA, DIPERLUKAN ADANYA PERUBAHAN PENGERTIAN TENTANG PRODUK PERTANIAN. SELURUH PRODUK PERTANIAN HENDAKNYA DIUBAH MENJADI PRODUK INDUSTRI YANG BAHAN BAKUNYA BERASAL DARI PERTANIAN. NILAI TAMBAH YANG TERDAPAT DARI SETIAP BAHAN BAKU TERSEBUT SEOPTIMUM MUNGKIN DAPAT DINIKMATI OLEH BANGSA INDONESIA. DENGAN DEMIKIAN, PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI, BUKAN HANYA AKAN DIPEROLEH DEvisa, TETAPI KITA SEKALIGUS AKAN MEMBANGKITKAN PEREKONOMIAN RAKYAT DI PEDESAAN.

Program yang dilakukan adalah memobilisasi kemampuan negaranya untuk mengelola produk pertanian, termasuk pemberian hutang kepada Universitas yang dikenal dengan program *Land Grant College* untuk dikelola. Kebijakan tersebut cukup ampuh untuk mengangkat kembali perekonomian AS. Amerika Serikat membangun perekonomiannya melalui penguatan agroekonomi selama 100 tahun (1836 - 1936), selanjutnya pengembangan industri dilakukan selama 20 tahun (1936 - 1956), setelah itu baru mengembangkan industri infomasi.

Kekuatan agroekonomi AS telah terwujud menjadi "buffer perekonomian nasional" yang tahan terhadap gejolak sehingga tetap menjadi negara adidaya. Strategi yang ditempuh oleh Indonesia dilakukan secara acak. Kita belum memiliki basis ekonomi yang kuat, sementara di pihak lain strategi pengembangan industri telah dikembangkan ke arah industri tersier bahkan ke industri infomasi. Sehingga jika terjadi goncangan, maka seluruh sendi perekonomian terganggu. Menjadikan agroindustri sebagai basis ekonomi bangsa perlu dilaksanakan secara hati-hati karena juga terdapat negara

yang gagal dalam pelaksanaannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Argentina yang mencanangkan agroindustri sebagai basis ekonomi bangsanya pada tahun 40-an, namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan.

Indonesia memiliki “pabrik alam” yang setia berproduksi secara kontinyu selama 24 jam tanpa ada yang bisa menghalangi kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Tiap hari sinar matahari melalui fotosintesa menghasilkan minyak kelapa sawit, lateks karet, serat kayu untuk pulp, aroma kopi dan teh, 4bahan baku farfum, protein dari ikan dan ternak, dan berbagai produk lainnya.

Pengelolaan agroekonomi menjadi tulang punggung dan motor perekonomian nasional membutuhkan kebijakan dan strategi yang handal agar peran tersebut dapat diemban. Bagi Indonesia, yang merupakan negara agraris tidak ada pilihan untuk mendapatkan sumber penghasilan negara kecuali pengembangan agroindustri.

Petanyaannya adalah apakah pengembangannya dibiarkan secara alami atau diupayakan melalui berbagai terobosan kebijakan. Karena kebutuhannya mendesak, maka dibutuhkan pengerahan potensi bangsa (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam mewujudkan agroindustri sebagai motor untuk menghasilkan devisa. Hanya dengan demikian, bangsa Indonesia dapat melepaskan diri dari “penjara” pemikiran bahwa ekonomi Indonesia sudah bangkrut.

Berbagai data menunjukkan bahwa apabila agroekonomi dikelola dengan baik, maka akan terjadi peningkatan ekspor produk pertanian. Dalam pengembangannya, diperlukan adanya perubahan pengertian tentang produk pertanian. Seluruh produk pertanian hendaknya diubah menjadi produk industri yang bahan bakunya berasal dari pertanian. Nilai tambah yang terdapat dari setiap bahan baku tersebut seoptimum mungkin dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, pengembangan agroindustri, bukan hanya akan diperoleh devisa, tetapi kita sekaligus akan membangkitkan perekonomian rakyat di pedesaan.

Terdapat 3 (tiga) sumber utama produk agroindustri yang potensial untuk dikembangkan, yaitu : (1) perkebunan, (2) kehutanan, dan (3) perikanan. Data Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa ekspor agroindustri produk perkebunan 5 lima tahun terakhir sekitar US \$ 5 milyar. Komoditas utama perkebunan Indonesia terdiri dari karet,

kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao, teh, kopi, rempah-rempah (lada, pala, dll), mete, dan minyak atsiri (nilam, akar wangi, dll). Sayangnya ekspor komoditas perkebunan masih terbatas pada komoditas primer, bukan hasil olahan yang nilai tambahnya lebih besar.

Dari sektor kehutanan, potensi lestari 26 juta m³ per tahun atau senilai sekitar US \$ 4 milyar (dihitung dari harga kayu log \$ 150 per m³). Jika termasuk penebangan liar, maka nilai devisa dari hutan mencapai sekitar \$ 12 milyar. Seandainya kayu tersebut diolah menjadi produk lain berupa kayu lapis dan pulp maka potensi perolehan devisa meningkat menjadi \$ 16 milyar per tahun. Hal tersebut tidak sulit dicapai karena saat ini Indonesia telah memiliki industri hilir pengolahan kayu berupa industri pengergajian, industri plywood, dan industri pulp dengan kapasitas masing-masing 15, 24, dan 24 m³ kayu log per tahun atau total kebutuhan kayu log sebesar 63 juta m³ per tahun. Namun permasalahannya adalah kemampuan hutan alam Indonesia untuk menghasilkan kayu hanya sekitar 40 juta m³ per tahun, berasal dari luas hutan 40 juta ha dengan kemampuan produksi alam yaitu dari kapasitas hutan potensi hutan. Ekspor produk perikanan saat ini sekitar \$ 7 - 10 milyar per tahun. Potensi lestari perikanan Indonesia diperkirakan mencapai \$ 70 milyar per tahun. Pencurian potensi ikan Indonesia diperkirakan mencapai \$ 10 milyar per tahun. Uraian tersebut menunjukkan bahwa, saat ini kemampuan agroindustri menghasilkan devisa diperkirakan mencapai sekitar \$ 30 milyar. Secara potensial kemampuan tersebut dapat ditingkatkan menjadi sekitar \$ 100 milyar melalui peningkatan produksi dan pengembangan industri hilir. Pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan potensi tersebut ?

PERAN TEKNOLOGI

Struktur agroindustri yang kuat dapat diwujudkan melalui pendekatan peningkatan nilai tambah pada seluruh rantai proses. Inti dari peningkatan nilai tambah tersebut adalah pemanfaatan teknologi. Melalui proses peningkatan nilai tambah akan dihasilkan produk yang memiliki daya saing di pasar global serta memiliki daya tahan terhadap gejolak ekonomi makro.

Karena permasalahan yang dihadapi bersifat kompleks, dinamis, serta bersifat probabilistik maka sangat dibutuhkan pendekatan sistem untuk menyelesaikannya. Dari aspek kebijakan, pendekatan sistem membutuhkan

adanya sinergi dan korelasi kebijakan yang terkait dengan pembangunan pertanian dan agroindustri. Hanya dengan demikian dapat diwujudkan efesinesi proses dan efektifitas pelaksanaan kebijakan eksternal. Hal yang terpenting adalah mermuskan kebijakan yang dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pembangunan pertanian dan pengembangan agroindustri. Sebagai pilar ekonomi rakyat, pengembangan agroindustri membutuhkan adanya

dimiliki, terutama keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Kedua aspek tersebut sangat terkait dengan kemampuan dalam pemanfaatan dan penguasaan teknologi.

Berbagai kebijakan yang perlu terus kita kembangkan untuk mewujudkan agroindustri sebagai pilar ekonomi rakyat antara lain adalah : pertama dengan penguasaan dan

BERBAGAI KEBIJAKAN YANG PERLU TERUS KITA KEMBANGKAN UNTUK MEWUJUDKAN AGROINDUSTRI SEBAGAI PILAR EKONOMI RAKYAT ANTARA LAIN ADALAH : PERTAMA DENGAN PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN TEPAT SASARAN KITA MENJADIKAN KOMODITAS PERTANIAN SEBAGAI BAHAN BAKU AGROINDUSTRI DAN BUKAN HANYA SEBAGAI KOMODITAS PERDAGANGAN, SEPERTI SELAMA INI MASIH BERLANGSUNG. EKSPOR KOMODITAS PERTANIAN KITA MASIH DIDOMINASI OLEH BAHAN MENTAH DAN BAHAN BAKU, SEMENTARA DI PIHAK LAIN KITA MENGIMPOR TIDAK SEDIKIT PRODUK HASIL OLAHAN KOMODITAS PERTANIAN. KEDUA, MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI YANG TEPAT GUNA DAN MUDAH DIGUNAKAN OLEH MASYARAKAT LUAS KITA MENGEMBANGKAN PERTANIAN DALAM KERANGKA AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI BERBASIS PEDESAAN. KETIGA, AGROINDUSTRI YANG BERBASIS TEKNOLOGI YANG DIKEMBANGKAN OLEH RAKYAT DIJADIKAN MOTOR PENGGERAK DI PEDESAAN UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI BASIS PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT. KEEMPAT PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI YANG MELIBATKAN MASYARAKAT LUAS DILAKSANAKAN MELALUI PENDEKATAN LINTAS SEKTORAL DENGAN PENDEKATAN SISTEM. KELIMA, SECARA BERTAHAP KITA HARUS BERUPAYA AGAR TERJADI TRANSFORMASI BUDAYA DALAM PENGELOLAAN PERTANIAN KE ARAH TERCIPTANYA BUDAYA YANG MENDUKUNG BERKEMBANGNYA AGROINDUSTRI.

transformasi budaya dalam masyarakat ke arah budaya yang berlaku dalam industri. Seperti halnya pengembangan industri lainnya, pembangunan agroindustri sangat terkait dengan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi. Aspek yang terpenting dalam pengembangan agroindustri adalah kebijakan yang terkait dengan upaya meningkatkan daya saing dari keunggulan komparatif pertanian yang

pemanfaatan teknologi tepat guna dan tepat sasaran kita menjadikan komoditas pertanian sebagai bahan baku agroindustri dan bukan hanya sebagai komoditas perdagangan, seperti selama ini masih berlangsung. Ekspor komoditas pertanian kita masih didominasi oleh bahan mentah dan bahan baku, sementara di pihak lain kita mengimpor tidak sedikit produk hasil olahan komoditas

pertanian. Kedua, melalui pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan mudah digunakan oleh masyarakat luas kita mengembangkan pertanian dalam kerangka agribisnis dan agroindustri berbasis pedesaan. Ketiga, agroindustri yang berbasis teknologi yang dikembangkan oleh rakyat dijadikan motor penggerak di pedesaan untuk digunakan sebagai basis pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keempat pengembangan agroindustri berbasis teknologi yang melibatkan masyarakat luas dilaksanakan melalui pendekatan lintas sektoral dengan pendekatan sistem. Kelima, secara bertahap kita harus berupaya agar terjadi transformasi budaya dalam pengelolaan pertanian ke arah terciptanya budaya yang mendukung berkembangnya agroindustri.

Peran pengembangan teknologi dalam pembangunan adalah mengintrodusir teknologi baru untuk restrukturisasi industri, meningkatkan produktivitas dan memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan melalui peningkatan daya saing. Penguasaan teknologi merupakan prasyarat untuk meningkatkan kekuatan ekonomi. Dengan demikian suatu bangsa tidak akan pernah survive tanpa teknologi. Teknologi adalah kunci utama pembangunan. Namun pengenalan teknologi baru memerlukan proses yang kadang-kadang mendapatkan kritik yang sangat tajam. Integrasi teknologi dalam perencanaan pembangunan sering dianggap tidak lebih sebagai bualan (*lip service*). Pengenalan perubahan teknologi akan mengandung risiko, tetapi mengambil keputusan untuk menghindari risiko tersebut justru mengambil risiko paling besar.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam agroindustri hendaknya dilaksanakan secara sinergi antara empat perangkat teknologi yaitu, perangkat keras (*technoware*), perangkat manusia (*humanware*), perangkat informasi (*infoware*), dan perangkat organisasi (*orgaware*). Agroindustri yang melibatkan masyarakat banyak yang sekaligus harus mampu mengatasi tantangan global akan berkembang dengan baik jika dikembangkan

atas dasar nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat, dikelola dengan manajemen/organisasi yang baik oleh sumber daya manusia yang berkualitas, serta memanfaatkan kemajuan teknologi.

Tujuan utama pemanfaatan teknologi untuk pembangunan agroindustri adalah untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi, tahan terhadap berbagai gejolak ekonomi yang terjadi, mampu mengantisipasi permintaan pasar, serta mendorong pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Dengan kondisi demikian maka akan terwujud dan berkembang berbagai jenis agroindustri yang mandiri dalam masyarakat. Untuk mengembangkan agroindustri yang demikian, agroindustri yang dikembangkan hendaknya berbasis teknologi pada seluruh tahapan proses mulai dari input, proses, dan output. Faktor input agroindustri meliputi bahan baku, teknologi, SDM, informasi (terutama informasi pasar), dan pendanaan. Seluruh faktor input tersebut hendaknya dikembangkan melalui berbagai aktivitas yang saling menunjang. Pengembangan teknologi untuk mendukung agroindustri hendaknya memenuhi kriteria-kriteria, yaitu : mudah dioperasikan, harga terjangkau, memberikan nilai tambah, meningkatkan daya saing, tepat guna dan tepat sasaran, dan siap dioperasikan. Ketepatan teknologi tidak ditentukan oleh faktor intrinstik teknologi tersebut, tetapi tergantung pada techno-socio-economic-political suatu negara. Hal yang perlu diingat bahwa bahwa kecil itu tidak selalu indah dan sederhana atau praktis tidak selalu tepat guna dalam pembangunan.

Seperti diketahui bahwa untuk mengembangkan agroindustri berdaya saing dibutuhkan penerapan teknologi pada seluruh tahapan proses. Peran teknologi pada masing-masing tahapan dalam pengembangan agroindustri sangat menentukan daya saing agroindustri yang dikembangkan. Pada tahap pembibitan misalnya, pemanfaatan teknologi diharapkan mampu memperbaiki mutu bibit untuk meningkatkan produktivitas,

meningkatkan daya tahan terhadap penyakit, dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Penerapan teknologi budidaya diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan yang meliputi efisiensi, pengendalian mutu tanaman, pengurangan penggunaan pestisida dan insektisida, serta pengurangan ketergantungan dari musim. Pada tingkat pengumpul (sub-grosir) dan terminal (grosir), peran teknologi diharapkan dapat mengurangi terjadinya losses, memperpanjang usia simpan, dan pengendalian mutu. Untuk pengembangan industri pengolahan, teknologi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi produksi. Untuk mendukung pemasaran (lokal dan ekspor), sangat dibutuhkan peran teknologi untuk pengemasan, transportasi dan distribusi produk. Pengembangan teknologi untuk mendukung agroindustri hendaknya memenuhi kriteria-kriteria, yaitu mudah, terjangkau, memberikan nilai tambah, meningkatkan daya saing, tepat guna (*appropriate*), dan siap dimanfaatkan (*instant*). Pengembangan SDM yang dilaksanakan diarahkan untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan kompetensi, mendorong kerjasama, dan meningkatkan kesejahteraan.

Dalam penyiapan bahan baku agroindustri hal-hal yang harus menjadi perhatian adalah tersedia dalam jumlah yang mencukupi, kualitas yang sesuai, dan tersedia pada setiap saat dibutuhkan (kontinyu). Ketersediaan dana yang mencukupi dengan kemudahan untuk memperolehnya serta didukung oleh kebijaksanaan skim pembiayaan yang kompetitif merupakan prasyarat untuk mengembangkan agroindustri. Dukungan informasi berupa teknologi, pasar, pesaing dan prospek produk agroindustri serta aspek manajerial sangat dibutuhkan untuk pengembangan agroindustri yang berbasis pada kepentingan rakyat banyak.

Untuk mengembangkan agroindustri dibutuhkan iklim agar kompetensi oleh masing-masing pihak yang terkait berkembang dengan baik. Kompetensi inti (*core competence*) yang perlu dikembangkan dalam kegiatan

pengkajian dan penerapan teknologi bidang agroindustri adalah menciptakan satu integrasi kemampuan : (1) penguasaan teknologi pembibitan, (2) teknologi budidaya, (3) teknologi pasca panen, (4) teknologi proses, (5) teknologi alat dan mesin, dan (6) manajemen agroindustri. Integrasi kemampuan tersebut akan mewujudkan kompetensi inti berupa “teknologi-agroindustrialist” yaitu kemampuan merancang, membangun, mengembangkan, dan mengelola agroindustri. Langkah untuk mewujudkan kompetensi inti tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat luas dalam kegiatan penyusunan perumusan kebijakan pengkajian, penerapan, dan pemasaran teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing agroindustri yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan sistem (*system approach*).

PENUTUP

Pengembangan agroindustri untuk menjadi sektor unggulan dalam perekonomian nasional hendaknya dilakukan dengan strategi perencanaan yang jelas. Strategi yang mengutamakan dapat menjual produk yang dapat dihasilkan (*supply driven economy*) dan strategi untuk memenuhi permintaan akan komoditas yang dapat dihasilkan (*demand driven economy*) hendaknya sudah diubah menjadi upaya pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh pasar (*customer driven economy*). Strategi tersebut secara paralel dilaksanakan oleh BUMN agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk agroindustri (*value added driven economy*). Melalui aplikasi teknologi pada seluruh rantai, sistem agroindustri diarahkan untuk menjadi salah satu basis pengembangan ekonomi berdasarkan nilai tambah dari masukan ilmu pengetahuan dan teknologi (*knowledge driven economy*).

Untuk menembus pasar global, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : (1) menghasilkan produk berkualitas, (2) konsisten, melalui kontrol proses yang ketat (terutama pengendalian mutu), (3) pendayagunaan teknologi tepat

guna, tepat sasaran dan relevan, serta (4) membangun dan mengembangkan jaringan pemasaran yang handal. Untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing di pasar global, strategi yang dilakukan adalah membangun joint venture dengan memanfaatkan teknologi terbaik, mendekati pasar, memproduksi produk untuk pasar lokal dan ekspor. Selain itu, juga diperlukan adanya aliansi dengan perusahaan lain untuk mengimpor produk yang mendukung pemasaran produk yang dihasilkan di pasar lokal.

Dalam mengantisipasi berbagai perubahan dunia, agar Indonesia dapat bangkit dan bersaing di era globalisasi, hendaknya kita bersikap pro aktif menyongsong diberlakukannya perdagangan bebas di berbagai kawasan (AFTA tahun 2003, APEC tahun 2010, dan WTO pada tahun 2020). Tantangan tersebut menuntut adanya berbagai penyesuaian kebijakan pembangunan pertanian untuk mengantisipasi dan menjadikan produk pertanian agar memiliki daya saing di pasar global melalui pengembangan agroindustri yang berbasis pada pemanfaatan teknologi.

Berlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah dan akan terbentuknya pemerintahan baru yang diharapkan makin demokratis diharapkan akan meningkatkan peran rakyat dalam pembangunan pertanian. Bentuk-bentuk kebijakan yang selama ini terkesan sentralistik dan top down akan bergeser ke arah desentralistik dan bersifat bottom up. Hal ini menuntut adanya penyesuaian berbagai kebijakan pembangunan pertanian agar perubahan tersebut memberikan sinergi positif dalam pengembangan agroindustri kerakyatan yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat dan pemacu pertumbuhan ekonomi bangsa.

REFERENSI:

- Austin J. E.** 1992. *Agroindustrial Project Analysis*. The Johns Hopkins University Press, Maryland.
- Brown, J. L.** 1994. *Agroindustrial Investment and*

Operation. EDI Development Studies, World bank Pub., Washington.

- Clay E. J. and B. B. Shaffer.** 1984. Di dalam Ellis F. 1994. *Agricultural Policies in Developing Countries*. Cambridge University Press, Melbourne, Australia. Downey W. D. and S. P.
- Erickson.** 1987. *Agribusiness Management*. McGraw-Hill International Inc., New York.
- Ellis F.** 1994. *Agricultural Policies in Developing Countries*. Cambridge University Press, Melbourne.
- Ferris, J. N.** 1998. *Agricultural Prices and Commodity Market Analysis*. McGraw-Hill Co., Boston.
- Hartwick, J.M. dan N.D. Olewiler.** 1986. *The Economics of Natural Resource Use*. Harper & Row Publisher, New York.
- Jauch L. R. and W. F. Glueck.** 1988. *Business Policy and Strategic Management*. McGraw-Hill International Inc., New York.
- Kartasasmita, G.** 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. CIDES, Jakarta.
- Nasoetion, M.** 1999a. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat sebagai Perwujudan Demokrasi Ekonomi : Implementasi dalam Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan*. Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta.
- Needham, D.** 1982. *The Economics and Politics of Regulation : A Behavioral Approach*. Little, Brown and Company, Boston.
- Panayotou, T.** 1993. *Green Market, The Economics of Sustainable Development*. CS Press, San Fransisco.
- Porter M. E.** 1994. *Keunggulan Bersaing: Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul*. Terjemahan. Binarupa Aksara, Jakarta.
- Sanim, B.** 1997. *Ekonomi Lingkungan*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Wirakartakusumah, A.** 2000. *Sistem Ketahanan Nasional Berbasis Pembangunan Pertanian Berkelanjutan*. Di dalam Hariyanto (ed.) *Pembangunan Pertanian sebagai Basis Ekonomi Bangsa*. Prosiding Seminar Nasional Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor, Jakarta.